

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TAHUN ANGGARAN : 2026

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / (Indikator/Tujuan)	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Baseline)	Indikator Kinerja
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	"Peraturan-Peraturan : Menteri Pendidikan Nasional No. 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan" "Memperhatikan data jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas per kabupaten/kota di Kaltim: - Samarinda (Laki : 7,788 Perempuan : 10,405) - Bontang (Laki : 1,758 Perempuan : 2,648) - Balikpapan (Laki : 5,344 Perempuan : 7,625) -PPU (Laki : 1,774 Perempuan : 2,511) -Paser (Laki : 3,315 Perempuan : 3,623) -Mahulu (Laki : 560 Perempuan : 538) -Kutim (Laki : 3,758 Perempuan : 4,782) -Kukar (Laki : 7,932 Perempuan : 9,821) -Kubar (Laki : 2,233 Perempuan : 2,331) -Berau (Laki : 3,514 Perempuan : 4,336)"	"Akses : Akses terhadap pengelolaan dana dan pemanfaatannya belum mempertimbangkan kebutuhan gender." "Partisipasi : Pelibatan perempuan dalam perencanaan dan pengawasan BOS masih minim." "Kontrol : Belum ada mekanisme yang memastikan keterlibatan setara dari guru dan tenaga kependidikan perempuan dalam proses persetujuan dan pemantauan pelaksanaan dana BOS." "Manfaat : Pemanfaatan hasil kegiatan belum memperhatikan kebutuhan spesifik gender."	"1. Tim pengelola BOS didominasi oleh laki-laki. Guru atau tenaga kependidikan perempuan belum banyak diberikan peran strategis dalam tim pengelola BOS. 2.Perencanaan anggaran sekolah belum berperspektif gender. RKAS disusun berdasarkan kebutuhan umum tanpa analisis kebutuhan spesifik berdasarkan gender. 3. Keterbatasan kapasitas SDM dalam penerapan PUG. Pemahaman tentang integrasi gender dalam perencanaan keuangan sekolah masih minim di tingkat pelaksana."	"1. Norma sosial dan budaya masih membatasi partisipasi aktif perempuan dalam urusan keuangan. Pengelolaan dana sering dianggap lebih cocok ditangani laki-laki karena dianggap lebih "tegas dan rasional". 2. Kurangnya sosialisasi PUG di tingkat sekolah. Sebagian besar sekolah belum memahami bagaimana memasukkan perspektif gender dalam perencanaan dan penggunaan dana BOS. 3. Dukungan kebijakan daerah terhadap implementasi BOS responsif gender belum kuat. Belum ada petunjuk teknis yang mewajibkan pelaporan atau perencanaan BOS berbasis gender."	Menjamin pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS secara transparan, partisipatif, dan responsif gender, agar seluruh warga sekolah tanpa membedakan gender dapat menikmati layanan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas.	"1. Melakukan pelatihan pengelolaan dana BOS berperspektif gender bagi kepala sekolah, bendahara, dan guru. 2. Melibatkan guru dan tenaga kependidikan perempuan dalam tim pengelola BOS dan penyusunan RKAS. 3. Menyusun RKAS yang responsif gender, mencakup kebutuhan sanitasi, kesehatan reproduksi, dan keamanan lingkungan sekolah. 4. Melakukan pemantauan pelaksanaan dana BOS secara partisipatif, melibatkan perwakilan perempuan dari unsur guru dan komite. 5. Mendorong sekolah melaporkan manfaat kegiatan BOS berdasarkan kelompok pengguna (laki-laki dan perempuan)." Masukkan : Rp. 0 Keluaran : - Hasil : -	"Total peserta didik SMA: 86.596 orang 1. Laki-laki: 37.976 orang (43,9%) 2. Perempuan: 48.620 orang (56,1%) "	Output :
KEGIATAN : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								Outcome :
SUB KEGIATAN : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas								Indikator Kinerja :
TUJUAN : Menjamin tersedianya dukungan pendanaan operasional sekolah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas.								"Output: Tersusunnya RKAS yang memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan" "Outcome: Meningkatnya keterlibatan guru dan tenaga kependidikan perempuan dalam pengelolaan dana BOS" "Dampak: Berkurangnya kesenjangan pemanfaatan dana BOS antar gender" "Impact: Terwujudnya sistem pengelolaan dana BOS yang inklusif, transparan, dan berkeadilan gender"



Samarinda, 03 Juni 2026

Dik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Amin, S.Pd., M.Pd

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197012311997021008